

RENCANA KERJA 2023



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN
2022**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
4.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja.....	42
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH	52
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategi lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tersusun dari program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan riil yang diakomodasi secara terpadu, partisipatif dan merupakan usulan masing-masing bidang dan sekretariat dengan menyesuaikan perkiraan alokasi anggaran yang tersedia.

Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi Dinas Tenaga Kerja untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023. Selain itu Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui capaian kinerja sebagai wujud dari kinerja Dinas Tenaga Kerja.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) rancangan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup : (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah (b) Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam orum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan harus sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Magetan dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah.

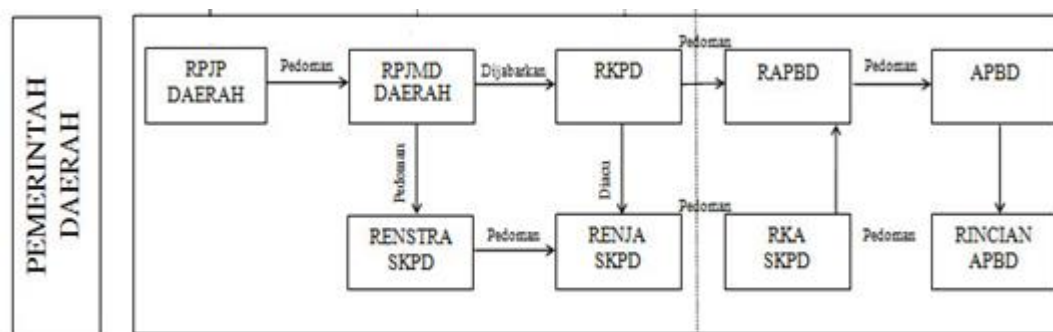
6. Penetapan

BAPPEDA Kabupaten Magetan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Perbup.

Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja dari Rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Tenaga Kerja, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Secara diagramatis alur penyusunan rencana kerja dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang PeUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);rubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguann dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah :

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan selama tahun 2023.
2. Panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 sehingga dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target capaian dan Pagu
Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Renja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah. Untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.915.093.541,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 3.758.480.616,-

Adapun anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2021

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A.	Sasaran 1 :			
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha			
	Program Hubungan Industrial	150.007.050	139.966.050	93,31
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.648.750	59.407.800	96,36
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	61.648.750	59.407.800	96,36

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengesahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	88.358.300	80.558.250	91,17
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	19.684.350	18.074.300	91,82
	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.999.000	16.809.000	84,05
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	48.674.950	45.674.950	93,84
B.	Sasaran 2 :			
	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.112.541.270	964.630.440	86,71
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	945.760.360	819.195.040	86,62
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	852.327.050	736.854.700	86,45
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	14.000.000	13.144.000	93,89
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	79.433.310	69.196.340	87,11
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	56.248.920	45.759.550	81,35
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	56.248.920	45.759.550	81,35
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.531.990	99.675.850	90,18
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	110.531.990	99.675.850	90,18
C.	Sasaran 3 :			
	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan			

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	284.982.055	91.480.749	32,10
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.982.055	91.480.749	32,10
	Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.997.500	56.461.800	94,11
	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	158.244.355	-	0,00
	Penyuluhan Transmigrasi	35.489.500	32.631.449	91,95
	Pelatihan Transmigrasi	31.250.700	2.387.500	7,64
D.	Sasaran 4 :			
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja			
	Program Penempatan Tenaga Kerja	143.424.275	140.113.500	97,69
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	109.796.525	107.094.250	97,54
	Pelayanan Antar Kerja	74.879.425	72.563.400	96,91
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	34.917.100	34.530.850	98,89
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9.719.650	9.294.400	95,62
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.719.650	9.294.400	95,62
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	23.908.100	23.724.850	99,23
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	23.908.100	23.724.850	99,23
C	Sasaran 5 :			
	Program rutin			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.224.138.891	2.422.289.877	75,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.997.950	89.052.335	93,74
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.998.000	65.397.385	93,43

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.950	23.654.950	94,62
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.388.882.368	1.801.139.404	75,40
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.388.882.368	1.801.139.404	75,40
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.761.703	172.159.745	85,33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.674.748	5.460.373	37,21
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.262.685	64.692.960	92,07
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.189.200	9.407.798	44,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.310.670	9.259.500	99,45
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.984.400	12.914.228	86,18
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.540.000	3.540.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.800.000	66.884.886	98,65
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.900.650	269.973.693	94,10
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.112.650	26.565.693	80,23
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.648.000	11.328.000	72,39
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.140.000	232.080.000	97,46
	Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.596.220	89.964.700	35,76
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.786.220	30.398.000	61,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.410.000	2.611.900	35,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.800.000	47.354.800	25,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.600.000	9.600.000	100,00
	TOTAL	4.915.093.541	3.815.022.692	76,62

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan %	100	100	100
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan orang	90	90	100
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan orang	90	90	100
Pengesahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama kasus	5	4	80
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah perusahaan yang terdata dan mendapatkan sosialisasi sarana hubungan industrial perusahaan	40	40	100

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama kasus	5	4	80
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh internasional kali	1	1	100
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/ kompetensi serta produktivitas kerja %	100	100	100
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja orang	130	138	106,15
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi orang	130	138	106,15
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta kali	8	8	100
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan peralatan pelatihan kerja unit	7	8	114,29
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan lembaga	20	20	100
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan lembaga	20	20	100

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas orang	50	50	100
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan orang	50	50	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih %	100	100	100
Koordinasi dan Singkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan pemkab magetan dokumen	1	1	100
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi Orang	25	25	100
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, dan mendapat pelatihan KK	5	0	-
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja %	100	100	100
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja bulan	12	12	100
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja orang	1.200	4.696	391,33

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja orang	100	100	100
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyediaan lowongan infoemasi pasar kerja bulan	12	12	100
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah dokumen penempatan tenaga kerja dokumen	12	12	100
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penanganan kasus PMI orang	10	9	110
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah kasus ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertangani orang	10	9	110
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek kepuasan masyarakat Angka	80,8	80,78	99,98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu dokumen	18	18	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dokumen	11	11	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dokumen	7	7	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan laporan	26	26	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN laporan	26	26	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah bulan	12	12	100

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan	12	12	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan	12	12	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulan	12	12	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor bulan	12	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan bulan	12	12	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bulan	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bulan	12	12	100
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan	12	12	100
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan	12	12	100
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan	12	12	100
Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bulan	12	12	100

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bulan	12	12	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya paket	1	1	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya paket	2	1	50

Secara umum target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan, namun ada beberapa target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, diantaranya:

- 1) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Faktor penyebabnya :

Waktu pelaksanaan rehabilitasi Gedung LPK Karangrejo tidak mencukupi, karena anggaran untuk rehab dianggarkan pada P-APBD 2021 yang pengesahan DPA nya tanggal 1 November 2021.

- 2) Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi

Faktor penyebabnya :

Tidak adanya pemberangkatan transmigran pada tahun 2021, hal ini sebagai akibat adanya pengurangan kuota penempatan transmigran di Provinsi Jawa Timur yang awalnya 7 KK menjadi 0 KK. Hal ini sesuai

surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No: 593/PKT.04.01/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021 dan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 475.1/3785/108.6/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Revisi Alokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2021. Karena tidak ada pemberangkatan transmigran di tahun 2021 maka pelatihan untuk calon transmigran tidak dilaksanakan.

Selanjutnya kami sajikan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021 :

Tabel 2.3 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra PD)			Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM Angka	81,5	Angka	11.405.950.401	80,8	Angka	3.224.138.891	81	Angka	2.422.289.877	99,98	75,13	99,11656	21,24	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu dokumen	54	Dokumen	295.000.000	18	Dokumen	94.997.950	18	Dokumen	89.052.335	100,00	93,74	33	30,19	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dokumen	33	Dokumen	150.000.000	11	Dokumen	69.998.000	11	Dokumen	65.397.385	100,00	93,43	33	43,60	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dokumen	21	Dokumen	145.000.000	7	Dokumen	24.999.950	7	Dokumen	23.654.950	100,00	94,62	33	16,31	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan laporan	134	Laporan	7.575.950.401	26	Laporan	2.388.882.368	26	Laporan	1.801.139.404	100,00	75,40	19	23,77	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN laporan	78	Laporan	7.565.950.401	26	Laporan	2.388.882.368	26	Laporan	1.801.139.404	100,00	75,40	33	23,81	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah bulan	36	Bulan	1.394.600.000	12	Bulan	201.761.703	12	Bulan	172.159.745	100,00	85,33	33	12,34	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan	36	Bulan	120.000.000	12	Bulan	14.674.748	12	Bulan	5.460.373	100,00	37,21	33	4,55	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan	36	Bulan	190.000.000	12	Bulan	70.262.685	12	Bulan	64.692.960	100,00	92,07	33	34,05	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulan	36	Bulan	150.000.000	12	Bulan	21.189.200	12	Bulan	9.407.798	100,00	44,40	33	6,27	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor bulan	36	Bulan	65.000.000	12	Bulan	9.310.670	12	Bulan	9.259.500	100,00	99,45	33	14,25	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bulan	36	Bulan	65.000.000	12	Bulan	14.984.400	12	Bulan	12.914.228	100,00	86,18	33	19,87	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bulan	36	Bulan	30.000.000	12	Bulan	3.540.000	12	Bulan	3.540.000	100,00	100,00	33	11,80	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD bulan	36	Bulan	774.600.000	12	Bulan	67.800.000	12	Bulan	66.884.886	100,00	98,65	33	8,63	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bulan	36	Bulan	1.272.700.000	12	Bulan	286.900.650	12	Bulan	269.973.693	100,00	94,10	33	21,21	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan	36	Bulan	282.700.000	12	Bulan	33.112.650	12	Bulan	26.565.693	100,00	80,23	33	9,40	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan	36	Bulan	100.000.000	12	Bulan	15.648.000	12	Bulan	11.328.000	100,00	72,39	33	11,33	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan	36	Bulan	890.000.000	12	Bulan	238.140.000	12	Bulan	232.080.000	100,00	97,46	33	26,08	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bulan	12	Bulan	867.700.000	12	Bulan	251.596.220	12	Bulan	89.964.700	100,00	35,76	100	10,37	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan bulan	36	Bulan	210.000.000	12	Bulan	49.786.220	12	Bulan	30.398.000	100,00	61,06	33	14,48	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bulan	36	Bulan	240.000.000	12	Bulan	7.410.000	12	Bulan	2.611.900	100,00	35,25	33	1,09	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya paket	3	Paket	317.700.000	2	Paket	184.800.000	1	Paket	47.354.800	50,00	25,62	33	14,91	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/ kompetensi serta produktivitas kerja %	100	%	8.270.000.000	100	%	1.112.541.270	100	%	964.630.440	100,00	86,71	100	11,66	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra PD)			Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja orang	840	Orang	6.360.000.000	130	Orang	945.760.360	138	Orang	819.195.040	106,15	86,62	16	12,88	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi orang	840	Orang	5.910.000.000	130	Orang	852.327.050	138	Orang	736.854.700	106,15	86,45	16	12,47	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta kali	36	Bulan	150.000.000	8	Kali	14.000.000	8	Kali	13.144.000	100,00	93,89	22	8,76	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan peralatan pelatihan kerja unit	30	Unit	300.000.000	7	Unit	79.433.310	8	Unit	69.196.340	114,29	87,11	27	23,07	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan lembaga	76	Lembaga	300.000.000	20	Lembaga	56.248.920	20	Lembaga	45.759.550	100,00	81,35	26	15,25	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan lembaga	76	Lembaga	300.000.000	20	Lembaga	56.248.920	20	Lembaga	45.759.550	100,00	81,35	26	15,25	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas orang	450	Orang	1.610.000.000	50	Orang	110.531.990	50	Orang	99.675.850	100,00	90,18	11	6,19	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan orang	300	Orang	1.610.000.000	50	Orang	110.531.990	50	Orang	99.675.850	100,00	90,18	17	6,19	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja %	100	%	3.810.000.000	100	%	143.424.275	100	%	140.113.500	100,00	97,69	100	3,68	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja bulan	36	Bulan	725.000.000	12	Bulan	109.796.525	12	Bulan	107.094.250	100,00	97,54	33	14,77	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja orang	7100	Orang	443.000.000	1200	Orang	74.879.425	4.696	Orang	72.563.400	391,33	96,91	66	16,38	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja orang	700	Orang	282.000.000	100	Orang	34.917.100	100	Orang	34.530.850	100,00	98,89	14	12,24	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja bulan	36	Bulan	1.470.000.000	12	Bulan	9.719.650	12	Bulan	9.294.400	100,00	95,62	33	0,63	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah dokumen penempatan tenaga kerja dokumen	36	Dokumen	200.000.000	12	Dokumen	9.719.650	12	Dokumen	9.294.400	100,00	95,62	33	4,65	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penanganan kasus PMI orang	190	Orang	1.615.000.000	10	Orang	23.908.100	9	Orang	23.724.850	90,00	99,23	5	1,47	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan %	100	%	1.080.000.000	100	%	150.007.050	100	%	139.966.050	100,00	93,31	100	12,96	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan orang	450	Orang	290.000.000	90	Orang	61.648.750	90	Orang	59.407.800	100,00	96,36	20	20,49	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan orang	450	Orang	290.000.000	90	Orang	61.648.750	90	Orang	59.407.800	100,00	96,36	20	20,49	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama kasus	18	Kasus	790.000.000	5	Kasus	88.358.300	4	Kasus	80.558.250	80,00	91,17	22	10,20	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terdata dan mendapatkan sosialisasi sarana hubungan industrial perusahaan	195	Perusahaan	90.000.000	40	Perusahaan	19.684.350	40	Perusahaan	18.074.300	100,00	91,82	21	20,08	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama kasus	19	Kasus	100.000.000	5	Kasus	19.999.000	4	Kasus	16.809.000	80,00	84,05	21	16,81	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh internasional kali	3	Kali	600.000.000	1	Kali	48.674.950	1	Kali	45.674.950	100,00	93,84	33	7,61	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra PD)			Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih %	100	%	2.440.000.000	100	%	284.982.055	-	%	91.480.749	-	32,10	0	3,75	DINAS TENAGA KERJA
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan KK	25	KK	2.440.000.000	5	KK	284.982.055	-	KK	91.480.749	-	32,10	-	3,75	DINAS TENAGA KERJA
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan pemkab magetan dokumen	6	Dokumen	1.000.000.000	1	Dokumen	59.997.500	1	Dokumen	56.461.800	100,00	94,11	17	5,65	DINAS TENAGA KERJA
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi Orang	150	Orang	180.000.000	25	Orang	35.489.500	25	Orang	32.631.449	100,00	91,95	17	18,13	DINAS TENAGA KERJA
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	jumlah calon transmigran yang terseleksi, dan mendapat pelatihan KK	30	KK	210.000.000	5	KK	31.250.700	-	KK	2.387.500	-	7,64	-	1,14	DINAS TENAGA KERJA
					27.405.950.401			4.915.093.541			3.758.480.616	91,15	76,47	25,79	13,71	DINAS TENAGA KERJA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, maka dilakukan analisis atau kajian terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Adapun hasil kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2021 (n-1)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2020 (n-2)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)	Th 2023 (n+1)	Th 2020 (n-2)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)	Th 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	9		11	12	13	
1	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha			-	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi			-	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan			10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	0 KK	0 KK	5 KK	5 KK	
4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja			27%	63%	64%	65%	62,58%	62%	64%	65%	

Secara garis besar sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, telah dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

Indikator yang digunakan untuk mengukur terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) terhadap jumlah kasus yang dicatatkan. Jumlah kasus tercatat pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan dari semua kasus yang tercatat tersebut dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Dengan demikian realisasi capaian terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaiannya sebesar 100%.

2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi adalah besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah tenaga kerja yang dilatih terhadap jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2021 sebanyak 138 orang dari 138 orang pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Dengan demikian realisasi capaian dan tingkat capaiannya sebesar 100%.

3. Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan

Capaian kinerja urusan transmigrasi diukur dengan indikator kinerja jumlah transmigran yang ditempatkan. Pada tahun 2021 Kabupaten Magetan tidak ada pemberangkatan transmigran, hal ini sebagai akibat adanya pengurangan kuota penempatan transmigran di Provinsi Jawa Timur yang awalnya mendapat kuota 7 KK menjadi 0 KK. hal ini sesuai surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No: 593/PKT.04.01/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021 dan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 475.1/3785/108.6/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Revisi Alokasi Penempatan Transmigran Tahun 2021. Dengan demikian realisasi capaian dan tingkat capaiannya sebesar 100%.

4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya penyerapan tenaga kerja adalah besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 5.520 orang dan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 3.415 orang. Dengan demikian realisasi capaian penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 sebesar 62% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian untuk penyerapan tenaga kerja sebesar 98,41%.

Selanjutnya capaian kinerja tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kinerja daerah sebagai berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan isu – isu strategis bidang tenaga kerja dan menjadi prioritas untuk segera diatasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu-isu strategis tenaga kerja di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- Angka pengangguran semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tamatan sekolah/ perguruan tinggi sedangkan kesempatan/ peluang kerja sangat terbatas.
- Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta masih minimnya keterampilan kerja didalam penguasaan perkembangan teknologi.
- Mulai adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja seiring dengan banyaknya industri di Magetan ditambah dengan belum pahamnya pelaku industri akan aturan ketenagakerjaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Magetan disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2023 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005-2025) Kabupaten Magetan yang dilaksanakan melalui misi , Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan SKPD, hal untuk mengetahui adakah perbedaan antara program dan kegiatan yang di rencanakan dengan rancangan awal RKPD misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang di rencanakan sesuai namun besaran kegiatannya berbeda.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan						Catatan Penting						
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3,001,050,479												3,001,050,479	
2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,167,801,929	2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,167,801,929			
2	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45,000,000	2	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45,000,000			
2	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	11 dokumen	20,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	11 dokumen	20,000,000			
2	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	7 laporan	25,000,000	2	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	7 laporan	25,000,000			
2	7	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,523,141,787	2	7	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,523,141,787			
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	22 orang/bulan	1,519,278,937	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	22 orang/bulan	1,519,278,937			

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten	38 laporan	3,862,850	2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten	38 laporan	3,862,850	
2	7	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144,771,450	2	7	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144,771,450	
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	1 paket	2,500,000	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	1 paket	2,500,000	
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	4 paket	20,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	4 paket	20,000,000	
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten	1 paket	6,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten	1 paket	6,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						Tangga yang Disediakan									Tangga yang Disediakan					
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten	2 paket	20,889,450	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten	2 paket	20,889,450	
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten	1 paket	15,042,000	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten	1 paket	15,042,000	
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten	12 dokumen	11,540,000	2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten	12 dokumen	11,540,000	
2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 laporan	68,800,000	2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 laporan	68,800,000	
2	7	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				311,818,000	2	7	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				311,818,000	
2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Kabupaten	12 laporan	30,000,000	2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Kabupaten	12 laporan	30,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						Listrik yang Disediakan									Listrik yang Disediakan					
2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	12 laporan	15,000,000	2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten	12 laporan	15,000,000	
2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten	12 laporan	266,818,000	2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten	12 laporan	266,818,000	
2	7	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143,070,692	2	7	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143,070,692	
2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten	2 unit	43,070,692	2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten	2 unit	43,070,692	
2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Kabupaten	11 unit	10,000,000	2	7	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Kabupaten	11 unit	10,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan						Catatan Penting					
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
2	7	1	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten	1 unit	80,000,000	2	7	1	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten	1 unit	80,000,000		
2	7	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten	1 unit	10,000,000	2	7	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten	1 unit	10,000,000		
2	0	0			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				85,000,000	2	0	0			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				85,000,000		
2	0	0	2.0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				85,000,000	2	0	0	2.0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				85,000,000		
2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten	1 dokumen	55,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten	1 dokumen	55,000,000		
2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kabupaten	2 perusahaan	30,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kabupaten	2 perusahaan	30,000,000		

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				276,748,550	2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				276,748,550	
2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				206,748,550	2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				206,748,550	
2	0	0	2.0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kabupaten	16 orang	186,748,550	2	0	0	2.0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kabupaten	16 orang	186,748,550	
2	0	0	2.0	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun n	Kabupaten	10 lembaga	20,000,000	2	0	0	2.0	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun n	Kabupaten	10 lembaga	20,000,000	
2	0	0	2.0		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				25,000,000	2	0	0	2.0		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				25,000,000	
2	0	0	2.0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kabupaten	20 lembaga	25,000,000	2	0	0	2.0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kabupaten	20 lembaga	25,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	0	0	2.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45,000,000	2	0	0	2.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45,000,000	
2	0	0	2.0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kabupaten	1 Dokumen	45,000,000	2	0	0	2.0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kabupaten	1 Dokumen	45,000,000	
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				341,000,000	2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				341,000,000	
2	0	0	2.0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				130,000,000	2	0	0	2.0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				130,000,000	
2	0	0	2.0	0	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kabupaten	300 orang	95,000,000	2	0	0	2.0	0	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kabupaten	300 orang	95,000,000	
2	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kabupaten	25 orang	35,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kabupaten	25 orang	35,000,000	
2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				189,000,000	2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				189,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kabupaten	1000 orang	9,000,000	2	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kabupaten	1000 orang	9,000,000	
2	0	0	2.0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten	500 orang	180,000,000	2	0	0	2.0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten	500 orang	180,000,000	
2	0	0	2.0		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				22,000,000	2	0	0	2.0		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				22,000,000	
2	0	0	2.0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kabupaten	50 orang	22,000,000	2	0	0	2.0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan dan uji kompetensi	Kabupaten	15 orang	22,000,000	
															Jumlah kasus ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertangani		10 orang			
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				130,500,000	2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				130,500,000	
7	5									7	5									

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	0	0	2.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				52,500,000	2	0	0	2.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				52.077.400	
2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kabupaten	1 laporan	52,500,000	2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan	Kabupaten	60 orang	52.077.400	
2	0	0	2.0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				78,000,000	2	0	0	2.0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				78,000,000	
2	0	0	2.0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kabupaten	60 perkara	23,000,000	2	0	0	2.0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kabupaten	60 perkara	23,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan							Catatan Penting					
KODE					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
2	0	0	2.0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaika n	Kabupaten	6 perkara	20,000,000	2	0	0	2.0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaika n	Kabupaten	6 perkara	20,000,000			
2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kabupaten	1 lembaga	35,000,000	2	07	05	2.02	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kabupaten	1 lembaga	35,000,000			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					190,000,000										190,000,000		
3	3	0			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					190,000,000	3	3	0			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					190,000,000	
3	3	0	2.0		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					190,000,000	3	3	0	2.0		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					190,000,000	
3	3	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembanguna	Kabupaten	1 laporan	35,000,000	3	3	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembanguna	Kabupaten	1 laporan	35,000,000			

RANCANGAN AWAL RKPD										Analisis Kebutuhan						Catatan Penting						
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
					Daerah Kabupaten/Kota	n Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									Kabupaten/Kota	n Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
3	3	0	2.0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kabupaten	5 Kepala Keluarga	115,000,000	3	3	0	2.0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kabupaten	5 Kepala Keluarga	115,000,000			
3	3	0	2.0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kabupaten	25 Kepala Keluarga	25,000,000	3	3	0	2.0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kabupaten	25 Kepala Keluarga	25,000,000			
3	3	0	2.0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kabupaten	5 Orang	15,000,000	3	3	0	2.0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kabupaten	5 Orang	15,000,000			
TOTAL									3,191,050,479										TOTAL	3,191,050,479		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rangkuman usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan yang diusulkan oleh stakeholder atau para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 (T-C. 32)
Usulan rogram dan Kegiatan dari Para Pelaku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

Nama SKPD : DINAS TENAGA KERJA

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024, dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan 1 :

Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
- b. Meningkatkan produktivitas pekerja;
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- f. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
- g. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- h. Menyusun standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- i. Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas;

2. Arah Kebijakan 2 :

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
- b. Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- c. Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis;

- e. Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akntabel;
- f. Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan kerja dalam negeri;

3. Arah Kebijakan 3 :

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- b. Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- d. Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Menurunkan tingkat resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- g. Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

4. Arah Kebijakan 4

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
- b. Meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
- c. Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/ buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
- e. Meningkatkan program, manfaat dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;

- f. Peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

5. Arah Kebijakan 5

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik;
- b. Meningkatkan tata kelola keuangan kementerian;
- c. Meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur;
- d. Meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan;
- e. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
- f. Meningkatkan tindak lanjut atas kerja sama luar negeri;
- g. Meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik;
- h. Meningkatkan SDM Kementerian ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM;
- i. Meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

6. Arah Kebijakan 6

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis resiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. Mewujudkan pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis resiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. Mewujudkan pengawasan Inspektorat III yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis resiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

- d. Mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis resiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Inspektorat Jenderal.

7. Arah Kebijakan 7

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja;
- c. Meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan;
- d. Menyediakan data dan informasi ketenagaan yang akurat dan terkini;
- e. Meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat;
- f. Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah tidak terlepas dari pencapaian misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan 2018-2023. Adapun tujuan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sedangkan target sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 %
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	100 %
Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	5 KK
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	65 %

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 (T-C. 33)

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten MAgetan**

OPD : Dinas Tenaga Kerja

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2									
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3,001,050,479			3,001,050,479	
2 07 001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	2,167,801,929			81,5 Skor	2,167,801,929
2 07 001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	45,000,000			17 Dokumen	45,000,000
2 07 001	2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20,000,000			10 Dokumen	20,000,000
2 07 001	2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	25,000,000			7 Laporan	25,000,000
2 07 001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan	38 Laporan	1,523,141,787			38 Laporan	1,523,141,787
2 07 001	2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1,519,278,937			22 Orang/bulan	1,519,278,937

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 07 001 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		38 Laporan	3,862,850			38 Laporan	3,862,850
2 07 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	144,771,450			12 Bulan	144,771,450
2 07 001 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2,500,000			1 Paket	2,500,000
2 07 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	20,000,000			4 Paket	20,000,000
2 07 001 2.06 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	6,000,000			1 Paket	6,000,000
2 07 001 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	20,889,450			2 Paket	20,889,450
2 07 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15,042,000			1 Paket	15,042,000
2 07 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	11,540,000			12 Dokumen	11,540,000
2 07 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	68,800,000			12 Laporan	68,800,000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
207001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	311,818,000		12 Bulan	311,818,000
207001	2.08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	30,000,000		12 Laporan	30,000,000
207001	2.08	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	15,000,000		12 Laporan	15,000,000
207001	2.08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	266,818,000		12 Laporan	266,818,000
207001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	143,070,692		12 Bulan	143,070,692
207001	2.09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	43,070,692		2 Unit	43,070,692
207001	2.09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	10,000,000		11 Unit	10,000,000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 07 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	80,000,000			1 Unit	80,000,000
2 07 001 2.09 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10,000,000			1 Unit	10,000,000
2 07 002		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		100 %	85,000,000			100 %	85,000,000
2 07 002	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		1 Dokumen	85,000,000			1 Dokumen	85,000,000
2 07 002 2.01 001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	55,000,000			1 Dokumen	55,000,000
2 07 002 2.01 002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		2 Perusahaan	30,000,000			2 Perusahaan	30,000,000
2 07 003		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100 %	276,748,550			100 %	276,748,550
2 07 003	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		16 Orang	206,748,550			16 Orang	206,748,550
2 07 003 2.01 001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		16 Orang	186,748,550			16 Orang	186,748,550

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
2	07 003 2.01 002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		10 Lembaga	20,000,000			10 Lembaga	20,000,000
2	07 003 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		20 Lembaga	25,000,000			20 Lembaga	25,000,000
2	07 003 2.02 001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		20 Lembaga	25,000,000			20 Lembaga	25,000,000
2	07 003 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	45,000,000			1 Kegiatan	45,000,000
2	07 003 2.05 001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Dokumen	45,000,000			1 Dokumen	45,000,000
2	07 004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		100 %	341,000,000			100 %	341,000,000
2	07 004 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan	130,000,000			12 Bulan	130,000,000
2	07 004 2.01 002	Pelayanan antar Kerja		300 Orang	95,000,000			300 Orang	95,000,000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 07 004 2.01 003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		25 Orang	35,000,000			25 Orang	35,000,000
2 07 004 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				189,000,000				189,000,000
2 07 004 2.03 002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1000 Orang	9,000,000			1000 Orang	9,000,000
2 07 004 2.03 003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		500 Orang	180,000,000			500 Orang	180,000,000
2 07 004 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				22,000,000				22,000,000
2 07 004 2.04 001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		50 Orang	22,000,000			50 Orang	22,000,000
2 07 005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan		100 %	130,500,000			100 %	130,500,000
2 07 005 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1	Terlaksananya Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial		2 Kegiatan	52,500,000			2 Kegiatan	52,500,000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF			
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2	07	005	2.01	003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 Laporan	52,500,000		1 Laporan	52,500,000
2	07	005	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		6 Perkara	78,000,000		6 Perkara	78,000,000
2	07	005	2.02	001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		60 Perkara	23,000,000		60 Perkara	23,000,000
2	07	005	2.02	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		6 Perkara	20,000,000		6 Perkara	20,000,000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2 07 005 2.02 004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	35,000,000			1 Lembaga	35,000,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3 32 003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih		100 %	190,000,000			100 %	190,000,000
3 32 003	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			190,000,000				190,000,000
3 32 003 2.01 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	35,000,000			1 Laporan	35,000,000
3 32 003 2.01 004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		5 Kepala Keluarga	115,000,000			5 Kepala Keluarga	115,000,000
3 32 003 2.01 005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		25 Kepala Keluarga	25,000,000			25 Kepala Keluarga	25,000,000
3 32 003 2.01 006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		5 Orang	15,000,000			5 Orang	15,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah menyusun Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun Indikator kinerja, Target capaian dan pagu indikatif dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3,001,050,479					0
2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,167,801,929					0
2 07 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							45,000,000					0
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		81,5 Skor	10 Dokumen	17 Dokumen	20,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		81,5 Skor	7 Laporan	17 Dokumen	25,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,523,141,787					0
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyusunan laporan keuangan		81,5 Skor	22 Orang/bulan	38 Laporan	1,519,278,937			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan		81,5 Skor	38 Laporan	38 Laporan	3,862,850			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							144,771,450					0
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	1 Paket	12 Bulan	2,500,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	4 Paket	12 Bulan	20,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	1 Paket	12 Bulan	6,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	2 Paket	12 Bulan	20,889,450			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	1 Paket	12 Bulan	15,042,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	12 Dokumen	12 Bulan	11,540,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,5 Skor	12 Laporan	12 Bulan	68,800,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								311,818,000					0
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	12 Laporan	12 Bulan	30,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	12 Laporan	12 Bulan	15,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	12 Laporan	12 Bulan	266,818,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,070,692					0
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	2 Unit	12 Bulan	43,070,692			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	11 Unit	12 Bulan	10,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	1 Unit	12 Bulan	80,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81,5 Skor	1 Unit	12 Bulan	10,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 Skor	0
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								85,000,000					0
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								85,000,000					0
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000			Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	100 %	0

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja		100 %	2 Perusahaan	1 Dokumen	30,000,000			Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	100 %	0
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								276,748,550					0
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								206,748,550					0
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja		100 %	16 Orang	16 Orang	186,748,550			Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	0
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja		100 %	10 Lembaga	16 Orang	20,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	0
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								25,000,000					0
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan		100 %	20 Lembaga	20 Lembaga	25,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	0
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								45,000,000					0
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	45,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	0
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								341,000,000					0
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								130,000,000					0
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah pelayanan antar kerja		100 %	300 Orang	12 Bulan	95,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	0
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah pelayanan antar kerja		100 %	25 Orang	12 Bulan	35,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	0
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								189,000,000					0

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja		100 %	1000 Orang	12 Bulan	9,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	0
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja		100 %	500 Orang	12 Bulan	180,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	0
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								22,000,000					0
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penanganan kasus PMI		100 %	50 Orang	50 Orang	22,000,000			Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	0
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								130,500,000					0
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								52,500,000					0
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terlaksananya Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial		100 %	1 Laporan	2 Kegiatan	52,500,000			Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 %	0
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								78,000,000					0
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama		100 %	60 Perkara	6 Kasus	23,000,000			Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 %	0
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama		100 %	6 Perkara	6 Kasus	20,000,000			Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 %	0
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama		100 %	1 Lembaga	6 Kasus	35,000,000			Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 %	0
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								190,000,000					0
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								190,000,000					0
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								190,000,000					0

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
 Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan		100 %	1 Laporan	5 KK	35,000,000			Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 %	0
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan		100 %	5 Kepala Keluarga	5 KK	115,000,000			Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 %	0
3 32 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan		100 %	25 Kepala Keluarga	5 KK	25,000,000			Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 %	0
3 32 03 2.01 06	Pelatihan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan		100 %	5 Orang	5 KK	15,000,000			Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 %	0
TOTAL									3,191,050,479					0

BAB V

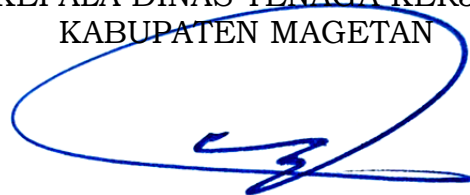
PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan APBD Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Magetan, Juli 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN



GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196305101990111001